JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 7, Juli 2026

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik

Chairani Avrilly*, Muhammad Sahrul
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Email: vrillygaming@gmail.com*, m.sahrul@umj.id

Keywords:
Implementation; Policy; Education; Inclusion.

Abstract
Inclusive education is an effort to provide equal opportunities for children with special needs to receive proper education without discrimination in accordance with the provisions of Article 10 Number 8 of 2016 which guarantees educational equality. This research aims to examine the implementation of the policy of the right to inclusive education for children with special needs at Muhammadiyah Elementary School 37 Pondok Cabe Udik. This study uses the theory of public policy implementation models, the theory of children with special needs, and the theory of inclusive education as the basis for analysis. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed thematically. The results show that policy implementation still faces obstacles such as curriculum adjustments, limited facilities, and the need for optimal support from teachers, schools, parents, and the community. The success of implementation is greatly influenced by curriculum adaptation, an inclusive learning environment, and ongoing teacher training. Overall, schools need to be a comfortable and inclusive environment so that children with special needs can learn and socialize optimally without discrimination. Effective policy implementation will ensure that the educational rights of children with special needs are met fairly and equally.

Kata Kunci:
Implemetasi; Kebijakan; Pendidikan; Inklusi.

Abstrak
Pendidikan inklusi merupakan upaya untuk memberi kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan layak tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Nomor 8 Tahun 2016 yang menjamin kesetaraan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan hak pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan publik, teori anak berkebutuhan khusus, dan teori pendidikan inklusi sebagai dasar analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala seperti penyesuaian kurikulum, fasilitas terbatas, serta perlunya dukungan optimal dari guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh adaptasi kurikulum, lingkungan belajar inklusif, serta pelatihan guru yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, sekolah perlu menjadi lingkungan yang nyaman dan inklusif agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar dan bersosialisasi secara maksimal tanpa diskriminasi. Implementasi

kebijakan yang efektif akan memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak berkebutuhan khusus secara adil dan setara.

PENDAHULUAN

Pendidikan Inklusi adalah Pendidikan untuk pemerimaan anal Berkebutuhan Khusus yang tidak kompleks yang tidak memberatkan pihak sekolah maka sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolahnya sehingga anak tetap dapat pendidikan yang layak seperti Anak Pada umumnya maka sekolah harus bisa menerima Anak Inklusi di dalam sekolahnya maka pemerintah meminta Sekolah Wajib menerima Anak Inklusi di lingkungan Sekolah.

Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama peserta didik lainnya dalam satuan pendidikan umum. Tujuannya bukan untuk memberi perlakuan istimewa, melainkan menjamin kesetaraan hak dan kewajiban setiap anak dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat bergantung pada komitmen pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perbedaan.

Dalam Ainscow, (2001), definisi terbaru dari Ofsted menyatakan bahwa sebuah institusi pendidikan yang menerapkan Pendidikan inklusif berarti sekolah yang memperhatikan pendidikan dan pembelajaran, pencapaian, sikap, dan kesejahteraan setiap anak. Dengan kata lain, sekolah yang efektif melakukannya.

Hal ini juga menjadi fenomenal di pemerintah kanrena banyaknya anak Inklusi yang tidak bersekolah dengan alasan bahwa sekolah tidak mau menerima padahal dalam pasal 10 Nomor 8 Tahun 2016 bahwa mereka wajib mendapatkan kesetaraan pendidikan seperti orang pada umumnya mereka wajib mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak boleh di beda bedakan sehingga mereka wajib mendapatkan pendidikan yang sama tidak boleh di beda bedakan.

SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe katagori belum siap pengadaan pendidikan inklusi karena kekurangan sumber daya Manusia yang memadai sehingga pihak sekolah belum siap tetapi atas mengikuti arahan pemerintah SD Muhamamdiyah 37 Pondok Cabe akan mengusahan pendidikan Inklusi ini berjalan.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan, memiliki kondisi medis, kondisi kejiwaan, atau kondisi bawaan tertentu. Mereka membutuhkan perhatian dan penanganan khusus supaya bisa mencapai potensinya. Tidak jarang mereka sering di kucilkan atau di pojokan dari lingkungan sekitarnya (Ursula Susanti et al., 2023). Adanya program sekolah inklusi memungkinkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan. Inklusi adalah cara untuk membuat lingkungan yang terbuka bagi orang-orang dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda. Ini mencakup sifat, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, dan budaya. Konsep inklusi berkembang saat ia menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa sekolah inklusi adalah jenis pendidikan yang memberi

kesempatan bagi setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi mereka secara alami dan zamannya (Rahayu & Dewi, 2013).

Program inklusi juga membuat teman yang normal dapat tidak melakukan pembullyan terhadap temannya yang inklusi sehingga pendidikan inklusi menjadi wadah bagi anak yang normal dapat berosialisasi dan tidak diskriminasi karena sekolah adalah wadah yang tepat untuk saling toleransi antar manusia karena sekolah gerbang pertama bagi anak selalu tetap tidak melakukan pembullyan sehingga mereka tetap mau belajar Semua orang yang terlibat dalam pendidikan inklusi memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pendidikan inklusi juga penting (Ramayani et al., 2024). Program pendidikan inklusi sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala sekolah (Lalak Muslimin & Muqowim, 2021). Kepala sekolah harus memiliki pandangan luas tentang pendidikan inklusi karena ini membantu siswa belajar lebih baik di sekolah. Peran guru juga sangat penting dalam menerapkan program pendidikan inklusi. Untuk mencapai tujuan pendidikan inklusi di sekolah dasar, guru profesional di bidangnya, baik guru pendamping maupun guru mata pelajaran, sangat penting (Ramayani et al., 2024) di sekolahnya. (di dalam Jurnal (Erza Mulia et al., 2024)

Orang tua juga bisa menyekolahkan anak Inklusinya di lingkungan sekolah ini di karenakan sekolah SLB terbatas maka orang tua memiliki opsi supaya anak ABK nya dapat pendidikan yang setara dan mereka juga mendapatkan sosialisasi dengan teman temannya di lingkungan sekolah sehingga mereka bisa bersosialisasi dan tidak di isolasi di lingkungan sekolah karena mereka berbeda maka ini Solusi terbaik bagi orang tua yang memiliki anak inklusi.

Oleh karena itu, peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Bagian ke-6 tentang Hak Pendidikan, secara eksplisit menetapkan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam hal pendidikan. Peraturan ini harus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas yang terus bersekolah di sekolah dasar, menengah, dan atas. (Aulia Diva et al., 2022)

Pemerintah juga menekankan sekolah harus menerima Anak Inklusif di sekolahnya dan Muhammadiyah salah satu Sekolah yang menerima Anak Inklusi ke sekolahnya dan SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik ini salah satu sekolah yang mengikuti aturan pemerintah untuk menerima Anak Kebutuhan Khusus di sekolahnya sehingga masyrakat yang memiliki Anak Kebutuhan Khusus ini dapat bersekolah seperti anak seumurnya dan dapat pendiidkan yang sama dengan teman seumurnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi pendidikan inklusi di berbagai sekolah. Himawati et al., (2023) menemukan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri masih menghadapi kendala dalam hal kurikulum dan pelatihan guru. (Sakinah & Andry, 2024) mengidentifikasi bahwa kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar penggerak memerlukan dukungan yang lebih optimal dari seluruh pemangku kepentingan. (Afifa & Subowo, 2020) menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara Dinas Pendidikan dan sekolah dalam pelaksanaan

program pendidikan inklusif di DKI Jakarta. (Minsih et al., 2021) menekankan urgensi pendidikan inklusif dalam membangun efikasi diri guru sekolah dasar. Penelitian (Pramono, 2020) juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar swasta berbasis keagamaan, khususnya di lingkungan Muhammadiyah, masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada sekolah negeri atau sekolah percontohan yang telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Penelitian yang mengintegrasikan model implementasi kebijakan Edward III (1980) dengan konteks sekolah swasta yang memiliki karakteristik dan keterbatasan berbeda masih jarang dilakukan. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, mengingat sekolah swasta seperti SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi dan menghadapi tantangan yang mungkin berbeda dengan sekolah negeri.

Novelty penelitian ini terletak pada pengujian implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar swasta berbasis keagamaan dengan menggunakan model Edward III (1980) yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada sekolah negeri, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai tantangan dan strategi implementasi pendidikan inklusi di sekolah swasta dengan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan, khususnya dalam konteks sekolah yang belum sepenuhnya siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan hak pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi berdasarkan empat variabel model Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas kebijakan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dan pendidikan inklusi, serta manfaat praktis sebagai masukan bagi pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) sebagai kerangka analisis utama. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel: komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Komunikasi mencakup transmisi informasi, kejelasan, dan konsistensi pesan kebijakan. Sumber daya meliputi ketersediaan staf, fasilitas, dan anggaran. Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja dan koordinasi

antarunit. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori anak berkebutuhan khusus dan teori pendidikan inklusi sebagai landasan konseptual untuk memahami karakteristik ABK dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ideal. Dengan demikian, pendekatan multidisiplin ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono, (2013), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek secara alami, di mana peneliti sendiri menjadi alat utama dalam mengumpulkan data. Pendekatan ini dipilih agar bisa memahami dengan baik bagaimana kebijakan pendidikan inklusi diterapkan di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik.

Penelitian itu dilakukan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 37, yang terletak di Pondok Cabe Udik, Kota Tangerang Selatan. Informan dalam penelitian dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu kepala sekolah, guru kelas, serta orang tua siswa berkebutuhan khusus yang dianggap memiliki pengetahuan langsung mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati, melakukan wawancara yang dalam, dan mencatat semua dokumen terkait. Observasi digunakan untuk melihat bagaimana pendidikan inklusi dijalankan di lingkungan sekolah.Wawancara dilakukan agar bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam dari responden mengenai cara kebijakan diimplementasikan.Dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung berupa berkas-berkas sekolah, foto kegiatan, serta arsip yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, melalui beberapa tahapan yaitu mengurangi data, menyajikan data, serta membuat kesimpulan. Data diuji keabsahannya dengan cara membandingkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan teknik triangulasi sumber serta triangulasi teknik, sehingga data yang didapat cukup dapat dipercaya (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Inklusi di dalam Sekolah Dasar Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik tidak memiliki guru pendamping sehingga anak Inklusi tidak optimal belajar di dalam kelas tetapi Guru berusaha memberikan metode pembelajaran supaya anak tersebut tetap belajar di dalam kelas.

Di karenakan minim fasilitas yang di miliki di dalam sekolah tersebut maka guru berusaha memberikan pembelajaran yang seadanya supaya anak inklusi tetap memahami materi yang sudah di berikan di lingkungan sekolah. Guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik tidak pernah membeda bedakan antara siswa biasa dengan siswa inklusinya.

Guru selalu memberikan informasi mengenai Anak tersesebut dengan orang tua dari siswa Inklusi sehingga orang tua mengetahui perkembangan Anak Inklusinya dari guru tersebut dan guru selalu memantau perkembangan siswanya di dalam lingkungan sekolah, sehingga anak Inklusinya tetap terpantau di lingkungan sekolah.

Setiap pagi guru selalu mengingatkan siswa non-Inklusi selalu tidak adanya pembullyan terhadap siswa Inklusi ini bentuk pengupayaan oleh pihak sekolah sipaya tidak adanya diskriminasi antar siswa dan selalu ada pemantauanya di lingkungan sekolah ini dan pihak sekolah selalu memantau setiap pegantian Pelajaran di dalam kelas.

Implementasi Kebijakan di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan, memiliki kondisi medis, kondisi kejiwaan, atau kondisi bawaan tertentu. Mereka membutuhkan perhatian dan penanganan khusus supaya bisa mencapai potensinya. Tidak jarang mereka sering di kucilkan atau di pojokan dari lingkungan sekitarnya. Anak berkebutuhan khusus di anggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan perlu dikasihani. (Ursula et al., 2021)

Guru tersebut mengatakan bahwa pandangan mereka tentang inklusi adalah bahwa guru harus mengajarkan anak-anak dengan baik karena mereka memiliki kesempatan untuk berkembang dengan kekurangannya, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak boleh dibeda-bedakan dengan anak-anak normal lainnya. Selanjutnya, Guru juga percaya bahwa program inklusi membantu anak menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Guru percaya bahwa dengan pendidikan inklusi ini, mereka dapat membantu ABK di kelas. Ketika mereka menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus di kelas, guru menyatakan bahwa mereka berempati terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Guru merasa kasihan ketika melihat siswa berkebutuhan khusus kurang memahami materi. Karena itu, terkadang guru mencoba menjelaskan materi kembali kepada siswa berkebutuhan khusus.

Tantangan baru bagi pengelola sekolah adalah menerapkan praktik inklusi. Pendidikan inklusi menghadirkan tantangan baru bagi guru. Mereka harus mengubah program pendidikan dan mempersiapkan. (Taylor & Ringlaben, 2012) menyatakan hal ini. guru untuk memenuhi semua kebutuhan siswa. (Taylor & Ringlaben, 2012) juga menjelaskan betapa pentingnya sikap guru terhadap inklusi. Mereka mengatakan bahwa guru dengan sikap yang lebih mendukung inklusi akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengatur kurikulum dan instruksi yang digunakan untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, guru dengan sikap ini dapat mengembangkan pendekatan yang lebih ramah terhadap inklusi.

Pembahasan dari penelitian ini menggunakan teori George C Edward III (1980). terdapat 4 variabel untuk mengetahui keberhasilan suatu penerapan kebijakan antara lain :

1. Komunikasi Terdapat beberapa variabel yang harus diperhatikan dalam komunikasi antara lain:

   a. Transmisi Penyampaian informasi atau transmisi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Pada SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe

adalah melalui penunjukan sekolah Surat Keputusan (SK) dan dilandasi dengan Peraturan

b. Penjelasan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk pendidikan Inklusi yang sudah di tunjukan pada SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik untuk penerimaan Siswa yang berkebutuhan khusus & mengikuti aturan dari pusat Muhammadiyah Untuk menerima Anak berkebutuhan Khusus di lingkungan sekolah Kemudian melakukan evaluasi terhadap guru di lingkungan sekolah
c. Konsisten di lingkungan SD Muhamamdiyah 37 Pondok Cabe Udik sudah konsisten selalu menerima Anak Berkebutuhan Khusus di dalam lingkungan sekolahnya sehingga siswa disana mendapatkan lingkungan yang baik dengan guru atau teman teman di sekolahnya.

Komunikasi Sumber daya Pendidikan Inklusi

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak-anak dengan keterlambatan perkembangan dan memiliki kondisi medis, masalah psikologis, atau cacat bawaan. Agar mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka, mereka membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Seringkali, mereka berada di tempat yang terisolasi atau jauh dari lingkungan sekitarnya.Anak-anak berkebutuhan khusus dianggap tidak berdaya dan harus dihargai.

Komunikasi orang tua dengan pihak sekolah sangat baik tidak ada perbedaan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah salah satunya sehingga orang tua dapat berkomunikasi dengan guru wali kelas dan guru wali kelas sangat respon dengan orang tua dari Anak Inklusi tersebut.

Faktor komunikasi termasuk sosialisasi satu arah kepada pelaksana kebijakan Kota Tangerang Selatan dan Grup sasaran melakukan sosialisasi formal ke sekolah dan rapat. Komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi di kota Surabaya termasuk pertemuan langsung atau webinar melalui Zoom, serta kunjungan langsung ke sekolah dan kantor dinas pendidikan.

Sumber Daya di Lokasi penelitian masih kurang untuk guru kebanyakan masih dari lulusan PGSD sehingga guru di sana masih banyak yang belum berkopeten untuk mendidik Anak Inklusi, Guru disana juga tidak ada seminar untuk guru dan tidak adanya guru dari Sekolah Luar biasa untuk di Lokasi penelitian nya.

Komunikasi antar guru dan kepala sekolah sangat baik sekolah saling merangkul satu sama lain tidak saling menggurui sehingga pendidikan Inklusi dan Komunikasi pihak sekolah dengan orang tua juga semakin baik dan guru juga semakin baik komunikasi dengan kepala sekolah.

Dengan kekurangan sumber daya namun pihak sekolah selalu mengusahakan menerima anak berkebutuhan khusus, jika dengan kasus yang berat pihak sekolah tidak dapat menerima anak tersebut di karenakan pihak sekolah belum mampu mengajar siswa yang seperti itu.

Pihak sekolah mengupayakan selalu ada komunikasi antar orang tua siswa dengan pihak sekolah dengan ini harapan orang tua dapat mengetahui bahwa perkebangan anak

di sekolah setiap harinya apa. Pihak sekolah selalu berharap orang tua membuka komunikasi dengan siswanya di lingkungan sekolahnya.

Pihak sekolah selalu mengusahakan selalu mengabarkan orang tua jika anak tersebut pulang sekolah sehingga orang tua siswa dapat mengetahui apa yang di lakukan oleh perserta didik di dalam lingkungan sekolah. Karena perkembangan anak anak berkebutuhan khusus ini berbeda dengan anak seusianya sehingga orang tua mengetahui perkembangan anaknya di lingkungan sekolahnya. Guru wali kelas memiliki group khusus wali siswa sehingga orang tua dapat mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekolah.

Disposisi Pendidikan Inklusi

Guru tersebut mengatakan bahwa pandangan mereka tentang inklusi adalah bahwa guru harus mengajarkan anak-anak dengan baik karena mereka memiliki kesempatan untuk berkembang dengan kekurangannya, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak boleh dibeda-bedakan dengan anak-anak normal lainnya. Selanjutnya, Guru juga percaya bahwa program inklusi membantu anak menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Guru percaya bahwa dengan pendidikan inklusi ini, mereka dapat membantu ABK di kelas. Ketika mereka menghadapi siswa yang memiliki kebutuhan khusus di kelas, guru menyatakan bahwa mereka berempati terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Guru merasa kasihan ketika melihat siswa berkebutuhan khusus tidak memahami materi dengan baik. Oleh karena itu, terkadang guru mencoba menjelaskan materi kembali kepada siswa berkebutuhan khusus.

Konsep guru terhadap siswa berkebutuhan khusus biasanya bergantung pada jenis hambatan yang dihadapi siswa, seberapa parah hambatan tersebut, dan kebutuhan siswa untuk pendidikan (Clough and Lindsay, 1991 dalam Avramidis and Norwich, 2002 dalam Elisa et al., 2013). Perspektif Guru dapat mengklasifikasikan tantangan yang dihadapi siswa berdasarkan tiga dimensi: tantangan fisik dan sensori, tantangan kognitif, dan tantangan perilaku-emosional. Sekolah X memiliki siswa dengan kebutuhan khusus yang tidak terlalu berat, seperti siswa dengan kesulitan belajar (learning disorders), siswa yang belajar lambat, siswa dengan Autis ringan, dan siswa tunagrahita yang mampu belajar. Siswa akan dirujuk ke sekolah luar biasa jika mereka membutuhkan penanganan khusus karena tingkat keparahan yang tinggi.

Kehadiran dukungan fasilitas di dalam kelas dan di tingkat sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap positif guru. Ketersediaan dukungan fasilitas ini adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap positif guru (Center and Ward, 1987; Myles and Simpson, 1989; Clough and Lindsay, 1991 dalam Avramidis and Norwich 2002). Elisa et al., 2013). Dalam hal ini, dukungan yang dimaksud adalah sumber daya fisik, seperti perlengkapan mengajar, perangkat IT, dan lingkungan fisik yang mendukung, serta sumber daya manusia, seperti terapis, kepala sekolah, orang tua, dan guru khusus. Meskipun sekolah tersebut merupakan sekolah percontohan, guru memiliki jumlah sumber daya yang terbatas untuk pembelajaran siswa berkebutuhan khusus.

Pihak sekolah selalu meyakinkan bahwa pendidikan Inklusi berjalan dan pendidikan Inklusi memberikan dampak yang positif bagi orang tua yang di sekitar sekolah untuk dapat melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut maka ini harapan dari pihak sekolah untuk orang tua yang memiliki Anak Inklusi di sekolah ini.

Penyelenggaraan program pendidikan inklusif terbagi menjadi dua cara penyelengaraannya, yaitu ditunjuk secara resmi oleh Dinas Pendidikan dengan diberikannya Surat Keputusan (SK) atau pihak sekolah secara resmi mengajukan kepada Dinas Pendidikan untuk menyelenggrakan pendidikan inklusif di sekolah tersebut dengan syarat administrasi yang sudah sesuai.

Fenomena sarana prasarana yaitu kelengkapan sarana prasarana. - Kelengkapan Sarana Prasarana Sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendidikan inklusif terdiri dari 1) alat asesmen, alat program khusus dan alat bantu pembelajaran atau akademik 2) ruang sumber 3) lingkungan yang aksesibel. Sarana prasarana di SD Muhamamdiyah 37 Pondok Cabe Udik. dari segi alat asesmen, alat program khusus dan alat bantu pembelajaran akademik sudah tercukupi seperti geomertri tiga dimensi dan puzzle, kartu-kartu dan sebagainya. Selain itu, ruang sumber juga sudah tersedia sebagai tempat berlangsungnya layanan kompensatoris untuk PDBK

Disposisi secara umum menurut Katz (1993) ‘’a disposition is a tendency to exhibit a pattern of behavior that is directed to a broad goal often, consciously, and voluntarily’’. Artinya kecenderungan untuk secara sadar, teratur, dan sukarela menunjukkan pola perilaku yang diarahkan pada tujuan yang luas. Sedangkan dalam ranah matematika, Disposisi matematis menurut Hapsari (2016), adalah proses kecenderungan berpikir dan bertindak dengan cara yang positif pada pembelajaran matematika. Indikator disposisi matematis meliputi ketekunan, refleksi, fleksibilitas, kegunaan, konsep diri sendiri tentang matematika, dan motivasi. Disposisi matematis memiliki peran kunci dalam menentukan keberhasilan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika (Gainsburg, 2007). Siswa dengan disposisi matematis yang baik cenderung lebih termotivasi untuk menyelesaikan masalah, lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan, dan memiliki pendekatan yang lebih strategis dalam menemukan solusi (Milah et al., 2023).

Struktur Birokrasi Pendidikan Inklusi

Kepala sekolah sangat mendukung tentang pendidikan Inklusi walaupun belum 100 % menerima dan belum siap untuk pemerimaan tetapi pihak sekolah mau tidak mau menerima karena mengikuti aturan pemerintah untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus.

Guru Wali kelas sangat perhatian dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di lingkungan sekolah maka Anak Inklusi mendapatkan perhatian dari guru di sekolah maka ini yang di butuhkan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di lingkungan sekolah maka Anak mendapatkan perhatian yang tidak di beda bedakan oleh pihak sekolah.

Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus juga merasa di hargai dan percaya oleh pihak sekolah untuk mendidik siswa yang berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah dengan ini harapan bahwa orang tua tetap bisa meng sekolahkan anak walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki.

Guru & Kepala sekolah berharap dengan adanya pendidikan Inklusi orang tua yang memiliki anak Berkebutuhan Khusus dapat mengsekolahkan Anaknya di sekolah Inklusi dan dengan ini harapan pihak sekolah mau mengadakan ada Guru Pendamping Khusus di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe.

Dalam hal ini, proses penyampaian data yang bersumber dari orang tua peserta didik ke sekolah belum tersampaikan dengan baik sehinggamenurut Edward III dapat dikategorikan sebagai faktor komunikasi. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Salah satu indikator dalam komunikasi yang efektif adalah transmisi atau penyaluran komunikasi seperti penyaluran atau transmisi yang terjalin antara pelaksana program yaitu sekolah dengan kelompok sasaran yaitu peserta didik berkebutuhan khusus yang diwakilkan melalui orang tua mereka belum efektif karena tingkat validitas data yang diterima melalui pendaftaran online sehingga kondisi peserta didik tersebut benar-benar sesuai

Penerimaan ini sudah di tuangkan pada Pasal 10 No 8 Tahun 2016 dengan ini pendidikan inklusi ini dapat berjalan sesuai prosedur yang sudah di akui oleh pemerintah pusat sehingga sekolah wajib menerima anak tersebut hingga mereka selesai masa selesai sekolah di SD Muhammadiyah 37 Pondok cabe Udik.

Dalam hal ini menurut Edward III, informasi yang diberikan pelaksanaan dalam komunikasi kebijakan harus ditransmisikan atau disalurkan dengan jelas supaya tidak membingungkan atau ambigu. Lebih lanjut dijelaskan menurut Teori Komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell (dalam Nofrion, 2016:15) ada lima komponen dasar komunikasi, yaitu: komunikator, pesan, media, penerima, dan efek.

Faktor pendukung & penghambat pendidikan Inklusi

Pendukungnya menjadikan Sekolah mengadakan Pendidikan Inklusi seperti pasal 10 no 8 tahun 2016 maka sekolah inklusi menjadikan patokan utama bagi sekolah untuk menerima tidak boleh menolak jika ada anak inklusi di sekolah karena itu menjadi diskriminasi bagi anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolahnya.

Pendidikan inklusi juga sudah di adakan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 37 Pondok Cabe Udik maka Pendidikan Inklusi ini tetap harus di jalankan di sekolah walaupun masih adanya minim fasilitas yang ada di sekolah maka ini menjadikan bahwa Pendidikan inklusi jadi salah satu faktor sekolah mengadakan ini.

Pendidikan inklusi tidak akan berjalan jika pihak sekolah tidak mendukung fasilitas yang ada dan fasilitas yang memadai jika pendidikan Inklusi ini tidak di jalankan semestinya maka Pendidikan inklusi harus ada faktor pendukungnya bagi pihak sekolah yang mengadakan ini

Kepala sekolah adalah element pertama jika adanya Pendidikan Inklusi di dalam sekolah maka kepala sekolah ini adalah orang yang membuat aturan yang naungkan oleh Yayasan tersebut kepala sekolah juga yang menerima anak inklusi di lingkungan sekolahnya maka kepala sekolah yang memahami tentang penerimaan Pendidikan inklusi.

Bagi anak inklsi guru dan teman yang ramah adalah membuatnya nyaman maka faktor faktor pendukung ini salah satunya dukungan bagi anak inklusi untuk tetap mau belajar dan tetap mau mengikuti Pelajaran meskipun mereka mood mood an tetapi sekolah akan tetap mengusahakan mengenai pendidikan Inklusi ini di lingkungan sekolahnya.

Dukungan sosial bagi Anak berkebutuhan Khusus ini adalah lingkungan yang terbaik sehingga sekolah merupakan bagian dari dukungan dan guru juga bagian dukungan sosial yang ada untuk anak berkebutuhan khusus ini dengan ini harapan pihak sekolah yang selalu ada di lingkungan sosial anak.

Penghambatnya adalah pendidikan inklusi ini khususnya di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe adalah Kurangnya sumber daya manusia untuk lingkungan sekolah sehingga pendidikan Inklusi sering kali kekurangan orang Ketika di butuhkan tetapi pihak sekolah selalu mengusahakan anak anak inklusi tetap aman di sekolah dengan adanya CCTV di lingkungan sekolah.

Pendidikan Inklusi di SD Muhamamdiyah 37 Pondok Cabe adalah tidak memiliki guru pendamping khusus untuk anak Inklusi maka guru sering kerap kelelahan karena mereka tidak memiliki guru pendamping khusus untuk membantu proses Pelajaran dan guru dapat tidak berkosentrasi pada anak normalnya.

Pendidikan Inklusi tetap berjalan wapaupun kekurangan sumber daya manusia di lingkungan sekolah maka guru yang kosong maka menemani anak Inklusi belajar dan memantau teman teman anak Inklusi supaya tidak ada kejadian pembullyan yang membuat anak merasa minder atau Insecure dengan kekurangan yang di miliki saat ini.

Aksesibilitas fisik sekolah juga menjadi masalah. Beberapa sekolah masih belum menyediakan aksesibilitas untuk siswa dengan kebutuhan khusus, seperti siswa yang memerlukan kursi roda atau alat bantu lainnya. gerak. Selain itu, terbatasnya jumlah guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif membuatnya sulit. Peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus untuk membantu mereka berhasil dalam proses pembelajaran.

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dalam mendukung pendidikan inklusif. Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat lingkungan pendidikan yang inklusif. inklusif yang membantu siswa berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif juga dihalangi oleh masalah ekonomi. Keluarga dan sekolah seringkali tidak dapat menjalankan pendidikan inklusif karena biaya yang tinggi yang terkait dengan layanan khusus dan dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusi melalui Undang-undang Pasal 10 Nomor 8 Tahun 2016 telah dilakukan di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Adapun dalam pelaksanaannya masih butuh penyempurnaan di berbagai aspek baik aspek Disposisi Pendidikan Inklusi,Struktur Pendidikan Inklusi dan Komunikasi sumber daya. Namun walaupun demikian sekolah ini telah memenuhi

kewajiban untuk menerima dengan pintu terbuka untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang mau bersekolah di sini. Pendidikan Inklusi di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe masih ada kekurangannya salah satunya Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas yang kurang memadai untuk anak Inklusi masih sangat minim sehingga masih ada kekurangan di dalam lingkungan sekolah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dengan hal ini peneliti menyampaikan saran untuk Pendidikan Inklusi Di SD Muhammadiyah 37 Pondok Cabe: Kepala Sekolah: selalu memantau siswa yang berkebutuhan Khusus di dalam sekolah supaya tidak ada kejadian diskriminasi dari siswa Non- Berkebutuhan Khusus; Guru: memantau siswa yeng berkebutuhan khusus dan memberi pelayanan yang lebih untuk mereka supaya kelas kondusif di lingkungan sekolah; Orang Tua: selalu memantau tumbuh kembang anak Inklusinya supaya memudahkan guru dalam mengajar di dalam kelas dan sering berbicara dengan guru wali kelas dari anak berkebutuhan khusus ini.

REFERENSI

Afifa, R. N., & Subowo, A. (2020). Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi). *Journal of Management and Public Policy*, *9*(2), 348–365.

Aisyah Dewi, W. (2025). *Implementasi program Solider Inklusi dalam akses pelayanan pendidikan dasar kelompok difabel di Desa Trebungan Mangaran Kabupaten Situbondo* [Disertasi doktoral, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo].

Amin, K., Sari, A. K., Suryana, E., Sutarto, S., & Suhono, S. (2024). Learning disorders in neuroscience and Islamic education perspectives. *JMKSP: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, *9*(1), 72–86. https://doi.org/10.31851/jmksp.v9i1.13774

Dewi Eko Wati. (2019). *Kenali kesulitan belajar spesifik pada anak*. Pendidikan Inklusi.

Fahrudin, A., Andayani, S., & Rahmawati, D. (2025). Systematic literature review: Analisis kemampuan penyelesaian masalah ditinjau dari perspektif disposisi matematis siswa. *JagoMIPA: Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA, 5*(1), 165–175.

Hakiman, H., Sumardjoko, B., & Waston, W. (2021). Religious instruction for students with autism in an inclusive primary school. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 20*(12), 139–158. https://doi.org/10.26803/ijlter.20.12.9

Hikmat, H. (2022). Implementation of inclusive education for children with special needs in Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(2), 2469–2476. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2338

Himawati, K., Najitama, F., & Maryanto, M. (2023). Implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri Pecarikan. *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2*(3), 772–783.

Islam, A. D., Timorochmadi, F., Fakhrudin, M. Y., Yoseptry, R., Ratnawulan, T., & Rahayu, N. S. (2024). Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, 12*(1), 362–377. https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i1.1175

Jusni, E., Fonsén, E., & Ahtiainen, R. (2023). An inclusive early childhood education setting according to practitioners' experiences in Yogyakarta, Indonesia. *Education Sciences, 13*(10), 1043. https://doi.org/10.3390/educsci13101043

Maghfiroh, E. L., Alam, A. D., & Rosiawan, R. W. (2026). Analisis etika bisnis produksi dan pemasaran terhadap pelanggaran prinsip etika lingkungan hidup. *Media Mahardhika*, *24*(2), 312–334.

Mansur, H., Utama, A. H., Mohd Yasin, M. H., Sari, N. P., Jamaludin, K. A., & Pinandhita, F. (2023). Development of inclusive education learning design in the era of Society 5.0. *Social Sciences, 12*(1), 35. https://doi.org/10.3390/socsci12010035

Minsih, Taufik, M., & Tadzkiroh, U. (2021). Urgensi pendidikan inklusif dalam membangun efikasi diri guru sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 8*(2), 192–204. https://doi.org/10.38048/jipcb.v8i2.352

Nuraeni, R., Hidayat, S., & Mulyadi, S. (2025). The effectiveness of the learning service management strategy for students with autism in an inclusive elementary school. *Indonesian Journal of Primary Education*, *9*(1), 1–8.

Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L. (2023). Penerapan kebijakan hak aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia. *Lex Privatum, 12*(2).

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. UNISRI Press.

Sakinah, S. F., & Andry, H. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) tingkat sekolah dasar penggerak Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review, 1*(1), 628–650.

Sukardari, D. D. H. (2019). *Model pendidikan inklusi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus*. Yogyakarta.

Tarjiah, I., & Riyanti, I. (2019). Attitude of class teachers to students with autism in inclusive education primary schools. *Journal of ICSAR, 3*(1), 62–68. https://doi.org/10.17977/um005v3i12019p062

Woodcock, S., Sharma, U., Subban, P., & Hitches, E. (2022). Teacher self-efficacy and inclusive education practices: Rethinking teachers' engagement with inclusive practices. *Teaching and Teacher Education, 117*, 103802. https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103802

Yuniarni, D., Linarsih, A., Miranda, D., Halida, H., & Seli, S. (2023). Persepsi guru TK terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Pontianak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 7*(1), 629–636. https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3615

Zen, S., Ropo, E., & Kupila, P. (2023). Constructing inclusive teacher identity in a Finnish international teacher education programme: Indonesian teachers' learning and post-graduation experiences. *Heliyon, 9*(5), e16455. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16455